

ABSTRAK

Adanya asas *nemo plus juris* dapat melindungi pihak yang berhak atas suatu hak atas tanah, dengan melakukan pembatalan sertipikat. Hal ini sebagaimana terjadi dalam pembatalan sertipikat Hak Milik Nomor 704 di Desa Sidomulyo, Kecamatan Ampel, Kabupaten Boyolali atas nama Sri Subingah yang melanggar asas *nemo plus juris*, mengandung cacat administrasi, dan melaksanakan putusan pengadilan. Tujuan dari penulisan ini adalah mengetahui dan menganalisa akibat hukum sertipikat Hak Milik yang mengandung cacat administrasi bagi para pihak serta penerapan asas *nemo plus juris* sebagai bentuk perlindungan hukum bagi pemegang pemegang hak atas tanah yang sebenarnya. Metode penelitian yang digunakan menggunakan pendekatan yuridis empiris dengan metode analisis data bersifat kualitatif. Hasil penelitian meliputi: 1) Akibat hukum cacat administrasi dalam sertipikat bagi pihak tergugat yaitu sertipikat tersebut batal demi hukum, dan bagi pihak penggugat dapat mengajukan pembatalan sertipikat melalui gugatan pengadilan. 2) Penerapan asas *nemo plus juris* sebagai bentuk perlindungan hukum kepada pihak penggugat agar dapat memperoleh haknya kembali. Kesimpulan dari penulisan hukum ini, bahwa pembatalan sertipikat Hak Milik Nomor 704 di Desa Sidomulyo, Kecamatan Ampel, Kabupaten Boyolali atas nama Sri Subingah sudah tepat dikarenakan mengandung cacat administrasi dan perbuatan melawan hukum dalam penerbitannya.

Kata kunci: *Asas Nemo Plus Juris, Cacat Administrasi, Pembatalan Sertipikat Hak Atas Tanah.*

ABSTRACT

The existence of the principle of *nemo plus juris* can protect parties entitled to a land right, by canceling the certificate. This is as happened in the cancellation of Freehold Certificate Number 704 in Sidomulyo Village, Ampel District, Boyolali Regency on behalf of Sri Subingah who violated the principle of *nemo plus juris*, contained administrative defects, and carried out court decisions. The purpose of this paper is to find out and analyze the legal consequences of ownership rights certificates which contain administrative defects for the parties and the application of the principle of *nemo plus juris* as a form of legal protection for holders of actual land rights. The research method used is an empirical juridical approach with qualitative data analysis methods. The results of the research include: 1) The legal consequence of administrative defects in the certificate for the defendant is that the certificate is null and void, and the plaintiff can file for cancellation of the certificate through a court lawsuit. 2) The application of the principle of *nemo plus juris* as a form of legal protection for the plaintiffs so that they can regain their rights. The conclusion from the writing of this law is that the cancellation of the certificate of Freehold Title Number 704 in Sidomulyo Village, Ampel District, Boyolali Regency on behalf of Sri Subingah is appropriate because it contains administrative defects and acts against the law in its issuance.

Keywords: Principle of *Nemo Plus Juris*, Administrative defects, and Cancellation of Land Title Certificates.